

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu isu penting setiap pemerintahan di negara manapun. Persentase kemiskinan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam tingkat global, pengentasan kemiskinan dapat dilihat berdasarkan dokumen kebijakan program *Sustainable Development Goals* (SDGS) nomor satu tentang upaya mewujudkan dunia tanpa kemiskinan maupun kelaparan, dan menciptakan masyarakat dalam kondisi sehat sejahtera. Implikasinya setiap negara menyusun strategi kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di wilayahnya. Sedangkan peraturan terbaru terkait pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimaslisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini dikeluarkan untuk mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, melalui sinergi program dan kerja sama antarlembaga serta pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi program wajib bagi setiap pemerintahan dalam berbagai tingkatan.

Negara yang masuk dalam kategori sejahtera umumnya menggunakan kemiskinan relatif, yang disebut “garis kemiskinan yang relatif tinggi” (*strongly relative poverty line*). Negara-negara tersebut biasanya menggunakan nilai konstan terhadap nilai rata-rata atau nilai tengah pendapatan masyarakat di satu daerah, sehingga kemiskinan akan selalu ada walaupun pendapatan penduduknya

mengalami kenaikan (Adji et al., 2020). Di negara berkembang umumnya yang digunakan adalah kemiskinan absolut, yang diukur berdasarkan batas pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Implikasinya penduduk yang termasuk kategori miskin di negara maju, mungkin saja termasuk sejahtera apabila menggunakan ukuran absolutnya negara berkembang.

Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut, apabila dikelola secara optimal, dapat mendorong transformasi ekonomi menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi dan terintegrasi secara global. Namun demikian, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang bersifat multidimensional, dimana indikator keberhasilan pembangunan suatu negara sangat bergantung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. (Sumargo dan Simanjuntak, 2019)

Konsep memajukan kesejahteraan umum mengandung makna peningkatan kualitas hidup dalam berbagai aspek kehidupan sebagai wujud dari pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menuntut implementasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dimana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin (Sumargo dan Simanjuntak, 2019).

Dampak kemiskinan tidak hanya pada orang dewasa, melainkan pada anak-anak juga. Kemiskinan pada anak bahkan lebih berdampak dari pada orang dewasa.

Kemiskinan pada anak menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun mental anak, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang terus menumpuk sepanjang hidup anak. BPS (2017) menyatakan bahwa kemiskinan dapat memengaruhi mental, fisik, emosi, dan tingkat spiritual anak. Ortiz et al. (2012) menyatakan bahwa kemiskinan pada anak dapat dirasakan sepanjang hidup mereka (Ramadhani & Munandar, 2019). Kumala, Agustini, dan Rais (2013) juga menyatakan bahwa kemiskinan pada anak bersifat kerusakan jangka panjang. Selain itu, anak-anak yang miskin juga lebih beresiko untuk menjadi orang dewasa yang miskin dan meneruskan kemiskinan itu ke generasi berikutnya (Casimiro et al., 2013 dalam Sari, 2018; Ramadhani & Munandar, 2019; BPS, 2017).

Maka dari itu agar tidak terjadinya kemiskinan terhadap anak-anak perlu sekali memiliki orang tua atau keluarga yang stabil secara finansial agar garis kemiskinan terputus. Usia Kepala Rumah Tangga berkaitan erat dengan kemampuan produktivitas, pengalaman kerja dan stabilitas pendapatan setiap rumah tangga.

Kemiskinan ini juga akan terjadi jika pendidikan disetiap anggota keluarga masih rendah sebab akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang dimiliki setiap anggota keluarga. Selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sinarta dkk (2023) yang mana bahwa Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin. Sebab dengan latar belakang Pendidikan yang dimiliki anggota keluarga akan menentukan lapangan pekerjaan atau pendapatan individu dan keluarga.

Becker (1964, dikutip dalam Nur Faritz & Soejoto, 2020) dalam bukunya yang berjudul “Human Capital” menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Becker mengemukakan bahwa seseorang dengan mengenyam pendidikan yang tinggi (lama sekolah) akan mendapatkan upah yang lebih layak dan dapat menghindarkannya dari kemiskinan. Hal ini didukung lebih lanjut oleh Desmawan, et al. (2021) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia (yang diinterpretasikan melalui Human Capital Index) berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Peningkatan modal manusia dalam pendidikan dan kesehatan akan menunjang produktifitas seseorang yang dapat mengeluarkannya dari jerat kemiskinan.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kemiskinan merupakan permasalahan fundamental yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan di semua tingkat pemerintahan. Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin melakukan pengukuran kemiskinan menggunakan pendekatan *cost of basic needs* yang menghitung garis kemiskinan berdasarkan kemampuan minimum memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Metodologi ini menetapkan garis kemiskinan makanan berdasarkan kebutuhan kalori minimum 2.100 kilokalori per kapita per hari yang tersebar dalam 52 jenis komoditas pangan, sedangkan garis kemiskinan non-makanan mencakup perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. (Yudi, 2025; Adji dkk, 2020; Hill, 2021).

Fenomena statistik menunjukkan bahwa sejumlah besar penduduk yang secara teknis tidak diklasifikasikan sebagai miskin karena memiliki pengeluaran sedikit di atas garis kemiskinan, namun tetap menghadapi kondisi kehidupan yang penuh keterbatasan dan kerentanan. Data BPS September 2024 mengungkapkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan resmi tercatat 8,57%, terdapat 24,42% populasi atau sekitar 68,51 juta jiwa yang berada dalam kategori rentan terhadap kemiskinan (*vulnerable to poverty*). Kelompok masyarakat rentan ini berada dalam posisi ekonomi yang sangat rapuh, di mana pengeluaran mereka hanya berada pada kisaran garis kemiskinan hingga 1,5 kali garis kemiskinan. Kondisi tersebut menyebabkan mereka berada dalam situasi *near poor*, yakni masih belum dapat dikategorikan sebagai sejahtera tetapi juga tidak tercatat sebagai kelompok miskin secara resmi.

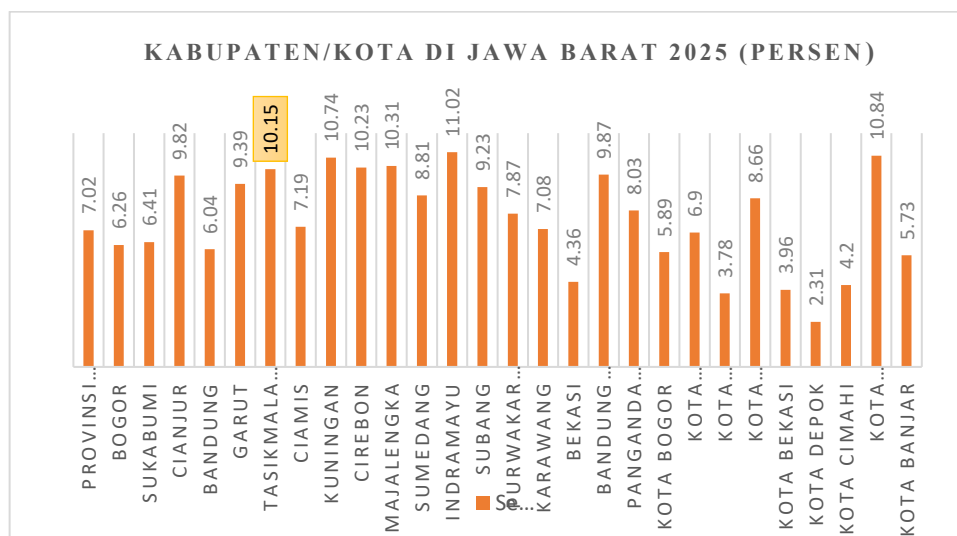
Fenomena kerentanan ini semakin menguat akibat berbagai faktor struktural maupun situasional. Naiknya harga bahan pokok, ketidakpastian pekerjaan, rendahnya tingkat tabungan, hingga beban biaya hidup yang meningkat menyebabkan kelompok ini sangat mudah terdampak oleh guncangan sosial maupun ekonomi. Contohnya, kenaikan inflasi pangan, pemutusan hubungan kerja (PHK), bencana alam, atau sakit anggota keluarga dapat secara cepat menurunkan kemampuan finansial mereka dan mendorong mereka masuk kembali ke dalam kemiskinan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa garis kemiskinan yang digunakan sebagai indikator resmi belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kesejahteraan masyarakat di lapangan.

Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa kelompok rentan ini seringkali tidak memiliki akses memadai terhadap perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan, bantuan tunai, atau program pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan mereka tidak memiliki jaringan pengaman (*safety net*) ketika menghadapi tekanan ekonomi. Bahkan, sebagian besar dari mereka bekerja pada sektor informal yang tidak memiliki jaminan pendapatan tetap dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi harian. Dengan demikian, jumlah penduduk yang rentan terhadap kemiskinan menjadi tantangan serius bagi pemerintah, karena tingginya populasi kelompok ini dapat menghambat keberlanjutan penurunan angka kemiskinan nasional secara jangka panjang. (Hannany dan Efendi, 2025; BPS Bangka Belitung, 2025).

Sejumlah literatur menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan sangat terkait dengan karakteristik wilayah. Daerah yang berada dekat dengan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi umumnya memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah. Data BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia masih mencatat kemiskinan tertinggi, seperti Papua Pegunungan (29,66%), Papua Tengah (27,60%), Papua Barat (21,09%), dan Papua Selatan (19,35%). Sementara itu, wilayah barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah, misalnya Jawa Tengah 9,58%, Jawa Barat 7,08%, dan DKI Jakarta 4,14%.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi yang belum merata, kualitas infrastruktur, serta akses terhadap layanan dasar yang lebih baik di wilayah barat. Pulau Jawa juga memiliki konsentrasi industri dan lapangan kerja yang lebih

banyak dibandingkan wilayah timur. Meskipun demikian, angka kemiskinan di wilayah Jawa Barat terutama di kabupaten dan daerah pedesaan masih berpotensi meningkat karena berbagai faktor seperti keterbatasan akses pekerjaan, ketimpangan pembangunan, dan tingginya biaya hidup. Kondisi ini tergambar pada grafik berikut:



(Sumber : BPS Jawa Barat, 2025)

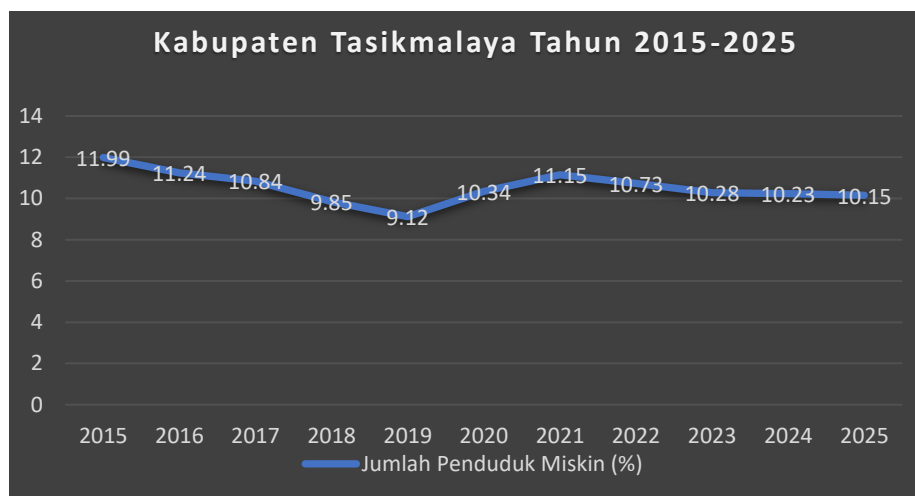
Gambar 1. 1 Grafik penduduk miskin di Kab/Kota di Jawa Barat 2025

Berdasarkan grafik diatas daerah Jawa Barat yang memiliki Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi adalah Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebesar 10,15%, menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat masih membutuhkan perhatian serius. Tingginya angka kemiskinan ini mencerminkan adanya berbagai persoalan struktural, seperti rendahnya tingkat pendidikan, akses pekerjaan yang terbatas, ketergantungan pada sektor informal, serta rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, karakteristik geografis Kabupaten Tasikmalaya yang didominasi oleh wilayah pedesaan juga memengaruhi pola mata

pencarian masyarakat yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian tradisional dengan pendapatan yang tidak stabil (Fauzi dkk, 2022).

Kabupaten Tasikmalaya, sebagai salah satu wilayah pedesaan di Provinsi Jawa Barat, memiliki basis ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pertanian, sehingga karakteristik geografi dan struktur ekonomi lokal secara signifikan memengaruhi profil kemiskinan daerah ini. Pada 2023, 68,5% penduduk miskin Kabupaten Tasikmalaya bermukim di desa, dengan 72,3% di antaranya bekerja sebagai petani skala kecil atau buruh tani yang rata-rata menggarap lahan kurang dari 0,5 hektar. Produktivitas pertanian di daerah ini tercatat hanya 3,1 ton gabah kering giling per hektare, di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 4,2 ton per hektare, yang mencerminkan rendahnya adopsi teknologi dan praktik pertanian modern. (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024).

Kerentanan tersebut diperparah oleh keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal hanya 8,7% angkatan kerja desa yang terserap di non-pertanian formal serta tingkat partisipasi sekolah menengah hanya mencapai 52,4% di kalangan pemuda desa. Infrastruktur pedesaan, seperti jaringan irigasi primer yang melayani hanya 45% lahan sawah, kualitas jalan desa rata-rata di bawah standar permukaan keras, dan jarak rata-rata 12 km ke pasar terdekat, semakin memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024).



(Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025)

Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya 2015-2025

Berdasarkan grafik diatas, kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun-tahun tertentu. Diantaranya terjadi kenaikan pada tahun 2015 dan 2021. Kondisi ini erat kaitannya dengan kondisi krisis ekonomi dan pandemi covid-19 pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren umum penurunan selama dekade terakhir, dari 11,99% pada 2015 menjadi 10,23% pada 2024. Namun, terdapat anomali kenaikan pada 2019, ketika krisis moneter global memicu lonjakan kemiskinan dari 9,12% menjadi 10,34% dalam setahun, serta pada periode 2019–2021, ketika pandemi COVID-19 menyebabkan angka kemiskinan naik dari 9,12% menjadi 11,15%.

Sejak tahun 2022 sampai 2023 angka kemiskinan mengalami penurunan sekitar 0,45% dari 10,73% menurun menjadi 10,28. Tahun berikutnya pun mengalami penurunan 0,05 % yaitu pada tahun 2023 sampai 2024 dari 10,28% menurun hingga 10,23%. Pada tahun 2024 sampai 2025 mengalami penurunan juga sekitar 0,08% yaitu dari 10,23% menjadi 10,15%. (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2024).

Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, laju penurunannya cenderung melambat, terutama pada periode pascapandemi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian penurunan kemiskinan secara kuantitatif dengan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan. Selain itu, tingginya lonjakan kemiskinan pada saat krisis mengindikasikan rendahnya ketahanan ekonomi rumah tangga miskin dan rentan. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi perlambatan penurunan kemiskinan serta kualitas penurunan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.

Konsentrasi deprivasi di sektor pertanian dan pedesaan menegaskan korelasi antara rendahnya produktivitas agraris dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya harus mencakup: peningkatan produktivitas pertanian melalui difusi teknologi cetak biru, pelatihan agronomi, dan akses pembiayaan mikro; diversifikasi mata pencaharian dengan pengembangan agro-industri dan ekonomi kreatif pedesaan; peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan lokal; serta perbaikan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, dan jaringan pemasaran. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di kawasan pedesaan Tasikmalaya. (Bappenas, 2023)

Maka sangat perlu strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor-sektor ekonomi produktif.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi besar pada sektor pertanian, industri rumahan, dan UMKM, namun potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara merata. Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan pun telah dilakukan melalui berbagai program, seperti penguatan ekonomi desa, bantuan sosial, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Namun, pencapaian hasil yang optimal masih memerlukan evaluasi dan penguatan dari berbagai sisi.

Penyataan diatas selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Salam dkk (2021) yang menjelaskan bahwa faktor dari meningkatnya kemiskinan suatu daerah di Jawa Timur menggunakan pendekatan moneter yaitu karena akses pada kesehatan cukup jauh sebab letak topografi wilayah tidak mendukung hal itu. Makatentu akan berakibat kepada pendapatan masyarakat dengan akses transportasi yang cukup sulit.

Penelitian lain dalam studi Jacobus dkk (2019) menyoroti karakteristik sosial ekonomi rumah tangga yang mempengaruhi kemiskinan moneter dan kemiskinan multidimensi dari banyak variabel rumah tangga, namun hanya berbeda Tingkat persentase pengaruhnya.

Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk menganalisis lebih mendalam terkait kondisi kemiskinan khususnya di Kabupaten Tasikmalaya terkait karakteristik kemiskinan moneter di kabupaten Tasikmalaya. Serta menganalisis seberapa berpengaruhnya beberapa variabel ekonomi rumah tangga terhadap kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini menjadi beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana karakteristik kemiskinan moneter di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 berdasarkan demografi?
2. Bagaimana pengaruh Usia KRT, Jenis Kelamin KRT, Jumlah ART, dan Pendidikan KRT secara parsial terhadap kemiskinan moneter?
3. Bagaimana pengaruh Usia KRT, Jenis Kelamin KRT, Jumlah ART, Pendidikan KRT secara bersama-sama terhadap kemiskinan moneter?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui karakteristik kemiskinan moneter Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 berdasarkan demografi.
2. Mengetahui pengaruh Usia KRT, Jenis Kelamin KRT, Jumlah ART, dan Pendidikan KRT secara parsial terhadap kemiskinan moneter.
3. Mengetahui pengaruh Usia KRT, Jenis Kelamin KRT, Jumlah ART, Pendidikan KRT secara bersama-sama terhadap kemiskinan moneter.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Menambah literatur referensi mengenai karakteristik kemiskinan moneter, serta pengaruh dari beberapa variabel ekonomi rumah tangga terhadap kemiskinan

di Kabupaten Tasikmalaya. Serta membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan yang dihadapi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Menjadi salah satu referensi pengambilan kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga lebih tepat sesuai dengan karakteristik kemiskinannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan sumber data sekunder.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

[illegible]